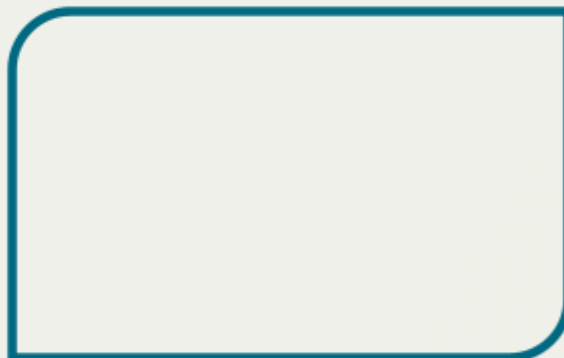
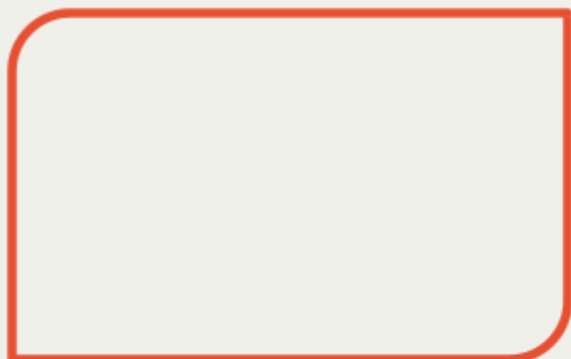




Global Energy Monitor

Boom & Bust Coal 2026

Melacak Jalur Pembangkit Listrik Batu Bara Global



Melacak Jalur Pembangkit Listrik Batu Bara Global (Mei 2026)

Boom & Bust Coal 2026 mencakup bagian-bagian berikut:

(1) Ringkasan eksekutif, (2) Perkembangan utama tahun 2025, (3) Ringkasan data global, (4) Cina: Pengembangan PLTU meningkat meskipun produksi listrik menurun, (5) India: Ekspansi batu bara berbenturan dengan target energi bersih, (6) Negara OECD, G20, dan non-OECD: Jalur perkembangan batu bara yang semakin berbeda antarwilayah, (7) Indonesia: Ketimpangan regulasi memperumit peran batu bara di dalam dan di luar jaringan listrik, (8) Amerika Serikat: Intervensi politik memicu kenaikan produksi dan harga, (9) Uni Eropa (EU27): Batu bara menuju penurunan terminal, (10) Korea Selatan dan Jepang: Jalur perkembangan batu bara yang semakin berbeda, (11) Australia: Transisi yang dipimpin energi surya membuka peluang komitmen tanpa PLTU baru, (12) Turki: Dorongan akar rumput untuk transisi berseberangan dengan rencana ekspansi produksi batu bara yang agresif, (13) Kanada: Perpanjangan usia PLTU bertentangan dengan target penghentian batu bara nasional, (14) Pakistan: Instalasi terdistribusi mendorong transformasi kelistrikan di luar jaringan nasional, (15) Bangladesh: Rencana energi baru, persoalan yang sama, (16) Asia Tenggara: pengembangan batu bara baru stagnan di luar Indonesia, (17) Rusia dan Asia Tengah: ekspansi batu bara domestik berlanjut, sementara rencana ekspor mengalami kegagalan, (18) Amerika Latin: Tidak ada proyek batu bara baru, namun terjadi kemunduran dalam jadwal penghentian, (19) Afrika: Usulan proyek batu bara tetap terbatas namun terus berlanjut, (20) Balkan Barat: Penundaan penghentian bertentangan dengan EU Carbon Border Adjustment Mechanism, (21) Ukraina: Membangun kembali sistem kelistrikan untuk masa depan yang lebih tangguh, dan (22) Tren kebijakan pembiayaan swasta untuk batu bara pada tahun 2025. (23) Lampiran 1: Kapasitas PLTU batu bara berdasarkan status dan negara/wilayah (24) Lampiran 2: Perubahan status pada tahun 2025 berdasarkan negara/wilayah

Terjemahan ini hanya mencakup beberapa kutipan dari laporan tersebut. Versi lengkapnya tersedia dalam bahasa Inggris di situs web Global Energy Monitor.

Selain Global Energy Monitor, penulis laporan ini adalah Africa Just Transition Network, ARAYARA International Institute, Bangladesh Working Group on Ecology and Development (BWGED), CEE Bankwatch Network, Beyond Fossil Fuels, Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA), Chile Sustentable, Climate Action Network (CAN), Coastal Livelihood and Environmental Action Network (CLEAN), Dhoritri Rokhhay Amra (DHORA), E3G, The Institute of Lawyers for the Protection of the Environment (INSAPROMA), Kiko Network, POLEN Transiciones Justas, Policy Research Institute for Equitable Development (PRIED), Razom We Stand, Reclaim Finance, Solutions for Our Climate (SFOC), Trend Asia, Waterkeepers Bangladesh (WKB).

Ringkasan Eksekutif

Pada 2025, dunia membangun lebih banyak pembangkit batu bara, namun justru menggunakannya lebih sedikit. Penambahan kapasitas baru pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara mencapai salah satu tingkat tertinggi yang pernah tercatat, meskipun produksi listrik berbasis batu bara mengalami penurunan. Kesenjangan ini sangat terlihat di Cina dan India, di mana energi angin dan surya memenuhi sebagian besar – bahkan seluruh – permintaan baru, sehingga menekan produksi listrik dari batu bara meskipun komisioning PLTU mencapai level tertinggi dalam satu dekade.

Seiring melebarnya kesenjangan antara pembangkit listrik batu bara dan daya yang dihasilkan, kapasitas batu bara semakin dipertahankan bukan sebagai sumber utama pembangkitan, melainkan sebagai bentuk “asuransi sistem”, yang diandalkan karena ketersediaannya saat kondisi krisis, bukan untuk penggunaan sehari-hari. Hal ini terlihat pada tahun 2025 baik di negara dengan produksi batu bara domestik besar – seperti Cina, India, dan Amerika Serikat – maupun di kawasan pengimpor batu bara, termasuk sebagian wilayah Uni Eropa.

Di Cina, rekor usulan pembangunan PLTU batu bara baru dibenarkan sebagai upaya menyediakan fleksibilitas bagi sistem kelistrikan serta menjaga pasokan energi domestik. Di India, proyek pengembangan batu bara terus berkembang untuk tahun kelima berturut-turut dengan argumen serupa terkait keandalan dan ketahanan energi. Di Amerika Serikat, kewenangan darurat federal mempertahankan operasi sejumlah PLTU yang seharusnya sudah pensiun, sementara beberapa negara Uni Eropa juga menunda rencana penghentian PLTU dengan alasan keamanan energi.

Namun, kondisi yang membuat batu bara tampak “diperlukan” justru sekaligus menjadikannya semakin tidak relevan. Di Cina dan India, PLTU batu bara dibangun untuk menopang ekspansi energi terbarukan yang pada saat yang sama mulai menggeser peran batu bara itu sendiri. Bagi negara pengimpor batu bara, volatilitas harga yang kadang membuat batu bara tampak lebih kompetitif dibanding gas justru memperkuat alasan untuk beralih sepenuhnya dari bahan bakar fosil. Krisis energi 2021–2022 menunjukkan hal demikian: kenaikan harga gas turut mengerek harga batu bara, sehingga mempercepat pengembangan energi bersih alih-alih memicu kebangkitan batu bara yang berkelanjutan.

Ketika kapasitas PLTU batu bara dipertahankan melebihi kebutuhan sistem kelistrikan, penyerapan kapasitas semakin terjadi melalui penurunan tingkat utilisasi, bukan peningkatan produksi. Hal ini menekan keekonomian pembangkit dan meningkatkan risiko stranded assets. Amerika Serikat menjadi pengecualian sebagai satu-satunya ekonomi besar pada 2025 yang justru meningkatkan produksi listrik dari batu bara, didorong oleh perubahan kebijakan yang secara eksplisit membatasi pengembangan energi bersih, sehingga melindungi batu bara dari tekanan kompetitif yang dihadapi di wilayah lain.

Meskipun beberapa pemerintah masih mendorong pembangkit batu bara melalui intervensi kebijakan, jumlah negara yang mengejar pengembangan batu bara baru terus menurun. Pada tahun 2025, hanya 32 negara yang masih mengusulkan atau membangun PLTU batu bara baru, turun dari 38 negara pada tahun sebelumnya dan 75 negara pada tahun 2014. Amerika Latin mencapai status tanpa proyek batu bara baru (No New Coal) pada 2025, sementara Korea Selatan berkomitmen untuk melakukan phase-out batu bara. Di negara-negara yang masih melanjutkan pengembangan, aktivitas umumnya terbatas pada sejumlah kecil proyek sisa atau proyek satuan. Dari seluruh kapasitas PLTU yang sedang dibangun secara global, hanya sekitar 5% yang berada di luar Cina dan India.

Seiring menyempitnya pipeline batu bara global, pengembangan baru semakin terkonsentrasi pada segelintir negara dan kawasan, lebih ditentukan oleh pilihan kebijakan domestik dibanding tren pasar global. Tantangan utama menuju 2026 bukan lagi ketersediaan alternatif pengganti batu bara, melainkan bertahannya kerangka kebijakan yang masih memperlakukan batu bara sebagai kebutuhan, bahkan ketika sistem kelistrikan semakin bergerak melampauinya.

Perkembangan Utama 2025

- Pada 2025, kapasitas PLTU batu bara global terus meningkat meskipun produksi listrik dari batu bara menurun. Kapasitas batu bara global naik sebesar 3,5%, sementara produksi listriknya turun 0,6%, mempertegas kesenjangan yang semakin lebar antara penambahan kapasitas dan tingkat pemanfaatannya.
- Penurunan produksi listrik batu bara paling tajam terjadi di Tiongkok dan India, meskipun kedua negara mencatat tingkat komisioning yang tinggi. Di Cina, kapasitas batu bara meningkat 6% sementara produksinya turun 1,2%; di India, kapasitas naik 3,8% sementara produksi turun 2,9%. Di kedua negara tersebut, energi angin dan surya memenuhi sebagian besar — bahkan seluruh — permintaan tambahan, sehingga memperlebar kesenjangan antara kapasitas yang meningkat dan output yang menurun.
- Di Cina, proyek PLTU batu bara baru dan yang direaktivasi pada 2025 melonjak ke rekor tertinggi sebesar 161,7 GW. Secara total, Cina memiliki lebih dari 500 GW kapasitas PLTU batu bara dalam tahap pengembangan. Jika direalisasikan, proyek-proyek ini akan mengunci ekspansi batu bara hingga periode Rencana Lima Tahun ke-15 (2026–2030), meskipun pemerintah telah berkomitmen untuk menurunkan konsumsi batu bara.
- India mencatat 27,9 GW usulan proyek PLTU baru dan yang direaktivasi kembali pada 2025. Secara total, India memiliki 107,3 GW kapasitas dalam

tahap perencanaan pra-konstruksi dan tambahan 23,5 GW dalam tahap konstruksi. Pemerintah India menargetkan penambahan 100 GW kapasitas PLTU batu bara baru dalam tujuh tahun ke depan, meskipun penambahan besar energi surya dan angin telah mendorong kapasitas non-fosil melampaui separuh dari total kapasitas terpasang pada 2025.

- Secara global, hampir 70% unit PLTU batu bara yang dijadwalkan pensiun pada tahun 2025 tidak direalisasikan, termasuk 69% di Uni Eropa dan 59% di Amerika Serikat. Di Uni Eropa, sebagian besar penundaan ini merupakan kelanjutan dari kebijakan darurat selama krisis energi 2022–2023, meskipun komitmen penghentian batu bara tetap berlaku. Di Amerika Serikat, penundaan lebih banyak dipicu oleh intervensi pemerintah yang secara eksplisit mempertahankan operasi pembangkit tua.
- Pengembangan batu bara semakin menyempit secara geografis. Jumlah negara yang mengusulkan atau membangun PLTU baru turun dari 38 pada tahun 2024 menjadi 32 pada tahun 2025. Negara yang keluar dari portofolio proyek batu bara termasuk Korea Selatan, yang pada 2025 berkomitmen untuk menghentikan PLTU batu bara pada 2040, serta Brasil dan Honduras, sehingga Amerika Latin tidak lagi memiliki usulan proyek PLTU batu bara baru.
- Konstruksi PLTU di luar Cina dan India mencapai titik terendah dalam sejarah, hanya sebesar 5% dari total kapasitas konstruksi global pada 2025. Hal ini menunjukkan bahwa ekspansi batu bara global semakin didorong oleh segelintir negara, bukan oleh permintaan global yang luas.
- Di Indonesia, kapasitas PLTU batu bara meningkat sebesar 7% pada 2025, dengan sekitar seperempat kenaikan tersebut berasal dari PLTU captive untuk pengolahan nikel dan aluminium. Indonesia juga menempati peringkat ketiga secara global untuk kapasitas usulan PLTU (11 GW), setelah Cina dan India, mencakup proyek on-grid baru serta keberlanjutan usulan proyek captive off-grid.
- Di Turki, hanya tersisa satu usulan proyek PLTU baru batu bara yang masih aktif, seiring persiapannya menjadi tuan rumah konferensi iklim COP31 mendatang, turun drastis dari lebih dari 70 usulan proyek pada 2015.
- Di Asia Selatan di luar India, produksi listrik batu bara sebagian besar bergantung pada impor. Pakistan dengan cepat mengembangkan energi surya terdistribusi yang membantu menstabilkan dampak fluktuasi pasar bahan bakar fosil. Sementara itu, Bangladesh menghadapi tantangan teknis dan pasokan bahan bakar pada pembangkit fosilnya serta belum berhasil mengembangkan kapasitas energi terbarukan yang signifikan.

- Di Asia Tenggara kecuali Indonesia, komisioning kapasitas batu bara baru menurun untuk tahun ketiga berturut-turut, meskipun gangguan pasokan gas yang mulai muncul pada 2026 mendorong sejumlah negara untuk lebih mengandalkan kapasitas batu bara yang sudah ada.
- Di Afrika, usulan proyek batu bara kembali terkonsentrasi di Zimbabwe dan Zambia, yang bersama-sama menyumbang dua pertiga dari pengembangan batu bara baru di kawasan tersebut.

Indonesia: Ketimpangan regulasi memperumit peran batu bara di dalam dan di luar jaringan listrik

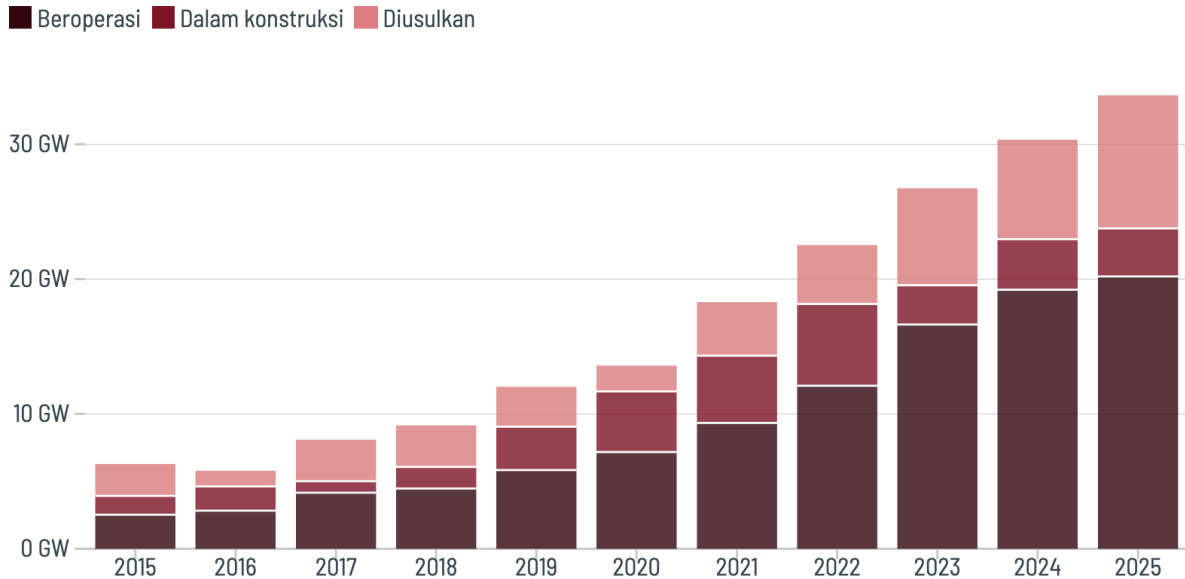
Di Indonesia, 2025 merupakan tahun dominasi bagi PLTU captive, terutama yang didorong oleh industri nikel. Kapasitas captive yang beroperasi mencapai 20 GW pada tahun tersebut menurut Global Coal Plant Tracker, termasuk tambahan data yang dimasukkan pada kuartal I 2026. Hampir 17 GW dari kapasitas ini terkait dengan industri nikel dan aluminium. Pertumbuhan ini umumnya terjadi di Sulawesi Tengah dan Maluku Utara, sehingga hilirisasi mineral yang diklaim sebagai strategi industrialisasi hijau justru didukung oleh energi batubara dalam skala besar.

Di Indonesia, 2025 merupakan tahun dominasi bagi PLTU captive, terutama yang didorong oleh [industri nikel](#). Kapasitas captive yang beroperasi mencapai 20 GW pada tahun tersebut menurut Global Coal Plant Tracker, termasuk tambahan data yang dimasukkan pada kuartal I 2026. Hampir 17 GW dari kapasitas ini terkait dengan industri nikel dan aluminium. Pertumbuhan ini umumnya terjadi di [Sulawesi Tengah](#) dan [Maluku Utara](#), sehingga hilirisasi mineral yang diklaim sebagai strategi industrialisasi hijau justru didukung oleh energi batubara dalam skala besar.

Meski target *Nationally Determined Contribution* (NDC) Indonesia mencakup emisi sektor energi secara agregat, pertumbuhan pembangkit *captive* yang signifikan masih belum [terintegrasi](#) secara memadai dalam kerangka dekarbonisasi ketenagalistrikan yang berfokus pada sistem terhubung jaringan (*on-grid*). Akibatnya, total emisi sektor ketenagalistrikan berpotensi tetap meningkat meskipun bauran energi pada sistem *on-grid* tampak semakin berkurang ketergantungannya terhadap bahan bakar fosil di atas kertas.

Kapasitas batu bara captive di Indonesia terus meningkat, mencapai 20 GW yang beroperasi pada akhir 2025

Kapasitas pembangkit listrik batu bara captive di Indonesia berdasarkan status, dalam gigawatt (GW)



Sumber: Global Energy Monitor, Global Coal Plant Tracker, Januari 2026 • Catatan: Data pada grafik ini mencakup penambahan data retrospektif ke GCPT pada kuartal I 2026.



Tujuan dari usulan kapasitas baru di sektor batu bara *captive* Indonesia telah bergeser dalam dua dekade terakhir. Pembangkit generasi awal dibangun untuk mendukung industri pulp dan kertas, tekstil, serta semen dan bahan bangunan. Usulan *captive* dalam [gelombang](#) berikutnya terkait dengan industri nikel, aluminium, dan logam lainnya, sehingga mendorong lonjakan besar dalam kapasitas terpasang, terutama sejak 2023. Secara keseluruhan, kapasitas *captive* yang beroperasi di Indonesia telah meningkat hampir sepuluh kali lipat dalam sepuluh tahun terakhir, dan kemungkinan sebenarnya lebih besar jika mempertimbangkan keterbatasan ketersediaan data.

Rencana baru untuk pembangunan pembangkit listrik berkapasitas 2 GW di kawasan industri Batam di bawah [Gallant Venture](#) menunjukkan tren yang berkembang untuk gelombang berikutnya dalam pembangunan PLTU batu bara *captive* baru di Indonesia. Di saat yang bersamaan, dorongan global terhadap pusat data sebagai tulang punggung teknologi kecerdasan buatan (AI) terus menguat. Ledakan AI berpotensi menempatkan Indonesia sebagai lokasi pusat data, dengan konsekuensi meningkatnya kebutuhan energi yang andal. Alih-alih memanfaatkan [kelebihan pasokan listrik](#) yang sudah ada dengan memperkuat keandalan jaringan dan distribusi listrik, Indonesia justru membangun PLTU batu bara baru.

Dalam berbagai kesempatan, pemerintah Indonesia telah beberapa kali mengumumkan komitmen iklim yang cukup ambisius. The Indonesian government has repeatedly announced fairly ambitious climate commitments, seperti target untuk [mencapai](#) Net Zero Emissions pada 2060, dan pernyataan politik Presiden Prabowo untuk [menutup](#) seluruh operasional PLTU batubara pada 2040. Namun, pernyataan-pernyataan publik tersebut tidak diturunkan menjadi kebijakan yang efektif dan rencana kelistrikan yang selaras dan konsisten untuk mencapainya.

Kesenjangan antara komitmen dan realisasi terlihat dari lambatnya pemanfaatan energi terbarukan. Indonesia memiliki potensi energi surya yang sangat melimpah, namun kapasitas PLTS atap terpasang di dalam negeri baru [mencapai](#) sekitar 479 MW¹ hingga akhir 2025, jauh di bawah target kumulatif sebesar 870 MW (1.000 MWp). Sebaran kapasitasnya pun sangat timpang, dengan sekitar 87% terkonsentrasi di Pulau Jawa. Sebuah inisiatif untuk memasang 100 GW energi surya terpusat dan terdesentralisasi [diumumkan](#) pada Agustus 2025 dan kembali [ditegaskan](#) dalam konteks Perang AS-Israel dengan Iran. Namun hingga saat ini, Indonesia baru memiliki sekitar 7.4 GW kapasitas PLTS terpusat yang bersifat [prospektif](#) – hampir seluruhnya belum memiliki jadwal pembangunan yang jelas.

Dalam konteks kebijakan, kontradiksi ini tercermin antara lain dari Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional (PP KEN). Regulasi ini masih mengokohkan energi fosil, seperti batubara dan gas, yang akan terus digunakan hingga setidaknya 2060, dan membuka ruang perluasan untuk teknologi turunan energi fosil lainnya seperti amonia dan hidrogen. Biomassa, yang menjadi [ancaman](#) besar terhadap deforestasi dan keberlanjutan [emisi](#) karbon di Indonesia, menempati posisi keempat dalam target pemanfaatan energi nasional dalam PP KEN, setelah batu bara, minyak, dan gas alam.

Target bauran EBT dalam rancangan PP KEN mengalami penurunan kisaran dari 23% menjadi 17–19% di 2025 (hanya [tercapai](#) 15.8%), dan peleburan kategori “energi baru terbarukan” yang berpotensi [melegitimasi](#) teknologi rendah karbon semu, sekaligus memperpanjang ketergantungan fosil, sehingga bertabrakan dengan mandat transisi energi yang selaras dengan target 1,5°C.

Kontradiksi semakin nyata ketika ditelusuri pada level perencanaan ketenagalistrikan, khususnya dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) yang [diterbitkan](#) pada Mei 2025. Secara hierarkis, RUKN seharusnya disusun secara konsisten dengan merujuk pada PP KEN sebagai kerangka makro. Namun dalam praktiknya, RUKN masih mempertahankan proyeksi pertumbuhan permintaan listrik yang tinggi, yang kemudian menjadi dasar

¹ Kapasitas pembangkit listrik tenaga surya biasanya dilaporkan dalam daya arus bolak-balik (*alternating currents/AC*).

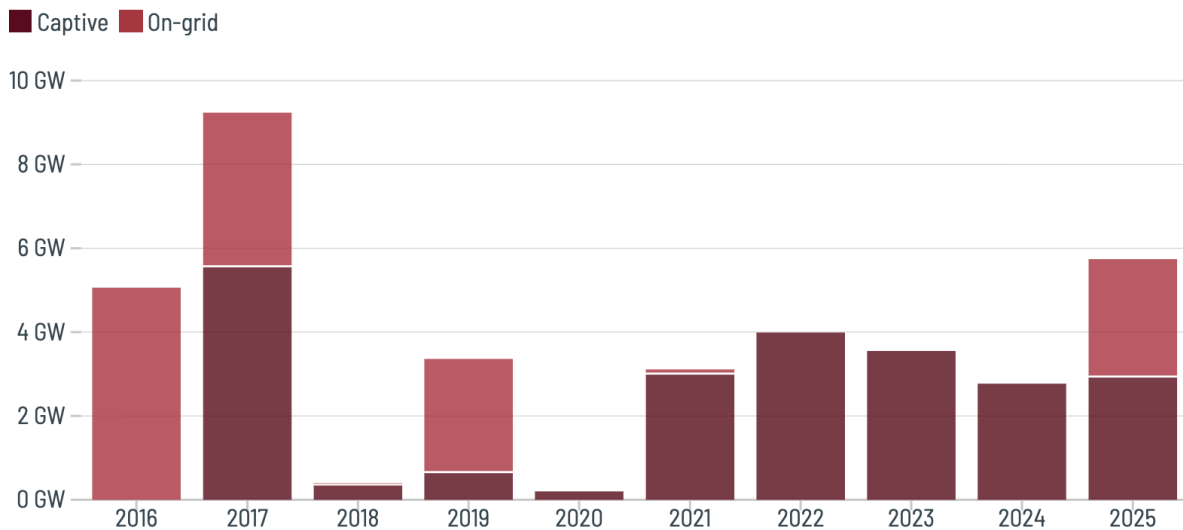
pembenaran untuk penambahan kapasitas pembangkit, termasuk berbasis fosil, dan tetap terlembagakan dalam kerangka kebijakan. Di sisi lain, RUKN belum memuat peta jalan yang tegas dan terukur untuk mempercepat penghentian operasional PLTU batu bara, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022.

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2025 tentang Peta Jalan Transisi Energi Sektor Ketenagalistrikan. Namun, daya ikat roadmap ini masih [terbatas](#) karena ketentuannya menempatkan pemensiunan PLTU sebagai langkah yang bergantung pada ketersediaan dukungan pendanaan. Dengan [laju](#) peningkatan bauran energi nasional yang masih rendah, kerangka transisi yang longgar dan berorientasi tekno-finansial akan berpotensi memperlambat penggantian PLTU dengan energi terbarukan.

RUPTL 2025–2034 semakin [memperkuat](#) inkonsistensi tersebut. Pemerintah memang telah menetapkan moratorium PLTU baru melalui Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022, namun ekspansi pembangkit batu bara tetap berlanjut, baik di dalam maupun di luar sistem ketenagalistrikan nasional. RUPTL 2025–2034 masih mencantumkan 6,4 GW [investasi](#) PLTU batu bara *on-grid* dalam perencanaan jangka pendek, dan juga tambahan kapasitas jangka panjang sekitar 3,1 GW, khususnya di wilayah dekat tambang. [Usulan](#) revisi terhadap Perpres 112/2022 juga muncul pada akhir 2025, berpotensi membuka ruang bagi ekspansi kapasitas batu bara lebih lanjut dengan dalih menjaga keandalan sistem.

Indonesia kembali mengusulkan kapasitas batu bara baru pada sistem on-grid untuk pertama kalinya sejak 2021, sementara usulan captive terus berlanjut

Kapasitas PLTU captive baru dan yang dihidupkan kembali di Indonesia per tahun, dalam gigawatt (GW)



Sumber: Global Energy Monitor, Global Coal Plant Tracker, Januari 2026 • Catatan: Data pada grafik ini mencakup penambahan data retrospektif ke GCPT pada kuartal I 2026.



RUPTL memasukkan penggunaan skema “[hybrid](#)”, dengan rencana pembangunan PLTU [Kalselteng-4 Hybrid](#) dan [Sumatera Hybrid](#). Istilah “*hybrid*” sendiri bersifat rancu, sehingga memicu kecurigaan bahwa kerangka ini pada praktiknya menjadi cara terselubung untuk memperpanjang dominasi batu bara dengan menempatkannya berdampingan dengan energi surya atau jenis pembangkit lainnya. PLTU Kalselteng-4 tetap berbasis batu bara di wilayah tambang (*mine-mouth*), dan Sumatera Hybrid pada dasarnya hanya mengaktifasi kembali kapasitas yang sebelumnya telah dibatalkan dengan nama baru.

RUPTL juga tidak hanya membuka ruang PLTU baru melalui skema *hybrid*, namun juga memperpanjang umur operasional PLTU beremisi tinggi yang telah beroperasi tanpa roadmap pensiun yang tegas. Pada akhirnya, batu bara tetap menjadi sumber beban dasar (*baseload*) utama, sehingga RUPTL 2025–2034 tidak mencerminkan rencana penghentian bertahap (*phase-out*), melainkan memperpanjang ketergantungan pada energi fosil dan memperdalam *carbon lock-in* dalam sistem kelistrikan nasional. Rata-rata usia armada PLTU di Indonesia baru sekitar 10 tahun, dan unit-unit skala besar baru seperti PLTU [Banten Suralaya](#) Unit 9 dan 10 (2 GW) masih terus memasuki tahap komisioning hingga akhir 2025.

Sejak September 2025, koalisi masyarakat sipil di Indonesia tengah menempuh jalur litigasi di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta untuk mengajukan [gugatan](#) terhadap Kementerian ESDM terkait RUKN dan RUPTL. RUKN dan RUPTL dinilai tak hanya gagal memenuhi mandat Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022, tetapi juga mempertahankan ketergantungan struktural pada energi fosil, dan [tidak sejalan](#) dengan target serta regulasi iklim nasional.

Di tengah terus menguatnya dinamika dan ketegangan seputar usulan PLTU baru di Indonesia, program yang dirancang untuk mentransisikan infrastruktur batu bara yang sudah ada juga masih menghadapi berbagai hambatan. Rencana pensiun dini PLTU [Cirebon-1](#) — yang semula masuk dalam program CIPP JETP — diumumkan [batal](#) pada awal 2026. Pemerintah [menilai](#) PLTU Cirebon-1 masih layak beroperasi karena usia teknis yang masih panjang dan telah menggunakan teknologi *supercritical boiler*. Sejumlah pihak [menilai](#) kegagalan ini terkait erat dengan kontrak *power purchase agreement* (PPA) yang bersifat *take-or-pay*, sehingga menciptakan kekakuan yang membuat pemensiunan dini menjadi rumit secara fiskal.

PLTU Cirebon-1 beroperasi di bawah skema *Independent Power Producer* (IPP), yang memperumit kewajiban kontraktual serta alokasi pendanaan transisi energi. Lembaga keuangan internasional cenderung lebih memprioritaskan [pembiayaan](#) untuk pembangunan infrastruktur baru dibandingkan [penutupan](#) aset yang sudah ada. Hal ini dinilai penting, karena penghentian dini membutuhkan legitimasi publik dan kelembagaan yang kuat. Akibatnya, ketika pembiayaan konsesional atau hibah tidak memadai atau tidak fleksibel, skema transaksi menjadi tidak [bankable](#). Gagalnya rencana penghentian dini PLTU Cirebon-1 memperumit peran Just Energy Transition Partnership (JETP) dalam mendorong agenda transisi energi Indonesia. Kondisi ini juga mencerminkan tarik-menarik kepentingan antara PLN, IPP, pemerintah, dan lembaga pembiayaan internasional.

Situasi ini sejalan dengan [temuan](#) Laporan Tematik JETP pada November 2025 tentang pembangkit *captive*, yang menunjukkan bahwa tantangan transisi energi di Indonesia tidak hanya terjadi pada pembangkit *on-grid*. Strategi penanganan pembangkit *captive* terus terbentur pada tiga masalah utama; keandalan, keterjangkauan biaya, dan kompleksitas regulasi. Tantangan transisi tidak hanya berkaitan dengan pencapaian target emisi, tetapi juga dengan ketiadaan desain kebijakan dan skema pembiayaan yang efektif. Pengumpulan data dan keterbukaan informasi menjadi langkah awal yang krusial untuk mengatasi tantangan tersebut.

Sementara itu, laporan Toxic Twenty November 2025 [menemukan](#) bahwa polusi dari 20 PLTU batu bara paling beracun di Indonesia berpotensi berkontribusi terhadap sekitar 156.000 kematian dini antara 2026 hingga akhir masa operasinya, dengan total biaya kesehatan dan ekonomi mencapai sekitar US\$ 109 miliar. Kerugian ekonomi tahunan

diperkirakan mencapai Rp52,4 triliun, termasuk penurunan pendapatan masyarakat secara agregat sebesar Rp48,4 triliun.

Sebanyak 1,5 juta pekerjaan diproyeksikan hilang akibat operasi 20 PLTU tersebut di Indonesia, sebagian besar terjadi pada pekerja di sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan; sektor yang paling terdampak oleh polusi. Dampak PLTU batu bara di wilayah pesisir juga mendorong pergeseran penghidupan, di mana nelayan dan petani beralih menjadi pekerja migran karena terganggunya mata pencaharian lokal. Perubahan pola penghidupan ini justru menempatkan komunitas dalam kondisi yang semakin rentan.

Dampak kesehatan dan ekonomi dari sektor batu bara Indonesia semakin diperkuat oleh posisi Indonesia sebagai produsen batu bara utama. Produksi yang mencetak rekor pada 2024 diikuti dengan sedikit [penurunan](#) pada paruh pertama 2025. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sempat memberi sinyal penurunan signifikan pada 2026 seiring melemahnya harga batu bara di pasar ekspor akibat penurunan penggunaan global. Namun, hingga awal 2026, pelaku industri [mendorong](#) penolakan terhadap rencana penurunan tersebut, dan peran Indonesia sebagai pemasok batu bara dapat terus [berubah](#) sepanjang tahun seiring dinamika peran batu bara di sejumlah negara yang masih bergantung pada energi fosil dalam konteks Perang AS-Israel dengan Iran.